

Peran Faktor Ekonomi Politik dalam Menjelaskan Ketimpangan Akses Pendidikan di Kabupaten Kerinci

Hendri Gunawan¹, Lince Magriasti², Yulhendri³

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

e-mail: hendrigunawan.unp.ac.id@gmail.com¹, lincemagriasti@fis.unp.ac.id²,
yulhendri@fe.unp.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran faktor ekonomi dan politik dalam menjelaskan ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan politik memengaruhi kesenjangan akses pendidikan di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pengumpulan data secara sistematis dari Google Scholar dan basis data ilmiah daring, dengan fokus pada literatur periode 2020 hingga 2025. Analisis menunjukkan bahwa kemiskinan, distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata, dan pengaruh politik lokal secara signifikan berkontribusi terhadap ketimpangan akses pendidikan. Selain itu, faktor sosial seperti partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan juga memengaruhi kondisi tersebut. Temuan ini menegaskan perlunya strategi kebijakan yang terintegrasi serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya upaya terpadu dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Ketimpangan Pendidikan, Faktor Ekonomi Politik, Akses Pendidikan, Kabupaten Kerinci*

Abstract

This study examines the role of economic and political factors in explaining educational access disparities in Kerinci Regency. The aim is to understand how economic and political factors influence educational access inequality in the region. The method used is Systematic Literature Review (SLR) with data collected systematically from Google Scholar and online scientific databases, focusing on literature from 2020 to 2025. The analysis reveals that poverty, uneven distribution of education budgets, and local political influence significantly contribute to disparities in educational access. Additionally, social factors such as community participation and policy support also affect the condition. These findings highlight the need for integrated policy strategies and collaboration among government, community, and private sectors to address educational disparities. The study concludes that a unified effort is essential to improve equitable access and quality of education in Kerinci Regency to support more inclusive and sustainable human resource development.

Keywords : *Educational Disparity, Economic And Political Factors, Educational Access, Kerinci Regency*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (Irnawati et al., 2022). Meskipun secara konstitusional hak ini diakui, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kualitas pendidikan di daerah urban dan rural, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai (Ulfa, 2023; Sulastri et al.,

2024). Selain itu, analisis partisipasi pendidikan juga mencatat bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari memuaskan, mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan akses yang merata (Fatah et al., 2021; Rizal & Syaibana, 2022). Dengan demikian, keberlanjutan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci untuk membangun sumber daya manusia yang kompetitif secara nasional dan global.

Salah satu contoh nyata dari kondisi tersebut adalah Kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi. Di wilayah ini, ketimpangan akses pendidikan tidak hanya sekadar masalah lokal, tetapi mencerminkan persoalan yang lebih luas dan kompleks yang juga terjadi pada sistem pendidikan nasional, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling terkait. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut hanya mencapai 8,05 tahun. Selain itu, angka partisipasi sekolah (APS) untuk kelompok usia 16 hingga 18 tahun hanya sebesar 65,2%. Angka ini menunjukkan adanya proporsi yang cukup besar dari anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Kondisi ini menggambarkan adanya berbagai hambatan struktural yang masih membelenggu, seperti kemiskinan yang meluas, jarak sekolah yang jauh dan sulit dijangkau, kualitas guru yang belum merata dan optimal, serta minimnya fasilitas pendidikan yang memadai. Semua faktor tersebut menjadi tantangan utama dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan yang setara, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kerinci maupun secara nasional (Dharana et al., 2024).

Salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan dalam akses pendidikan tersebut adalah faktor ekonomi yang masih menjadi kendala mendasar bagi banyak keluarga di Kabupaten Kerinci. Kemiskinan struktural yang telah mengakar kuat di masyarakat menyebabkan banyak keluarga kesulitan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Data menunjukkan bahwa sekitar 10,21% penduduk di Kabupaten Kerinci masih hidup di bawah garis kemiskinan (Dharana et al., 2024). Kondisi kemiskinan ini berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka putus sekolah, karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti biaya transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Selain itu, situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Rasio belanja langsung sektor pendidikan terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kerinci masih berada di bawah rata-rata nasional (Khairunnisa et al., 2021), sehingga menyebabkan minimnya investasi dalam pengembangan kualitas fasilitas dan sarana pendidikan. Rendahnya tingkat investasi ini secara langsung berdampak pada mutu layanan pendidikan yang diterima oleh siswa, mulai dari ketersediaan guru yang berkualitas hingga kondisi fisik sekolah yang kurang memadai. Akibatnya, siklus kemiskinan antar generasi sulit untuk diputus karena pendidikan yang tidak merata dan berkualitas rendah menghambat kesempatan generasi muda untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan.

Selain faktor ekonomi, aspek politik juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi ketimpangan akses pendidikan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Kerinci. Kebijakan pendidikan yang dibuat seringkali kurang berpihak kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, hal ini dikarenakan proses perumusan kebijakan tersebut minim melibatkan partisipasi publik secara luas dan inklusif. Akibatnya, kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok marjinal atau masyarakat yang berada di pelosok seringkali tidak terakomodasi secara adil dan merata dalam setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan (Muhammad, 2023). Selain itu, distribusi guru yang tidak merata dan fokus program bantuan pendidikan yang cenderung lebih memprioritaskan wilayah perkotaan menjadi faktor penting yang semakin memperlebar jurang ketimpangan akses pendidikan antara daerah urban dan rural (Muhammad, 2023). Kondisi ini diperparah dengan lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Kurangnya pengawasan dan kontrol yang memadai membuka peluang terjadinya penyimpangan dana serta pengabaian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat rentan, khususnya mereka yang berada di daerah-daerah terpencil dan miskin (Ratodi et al., 2021). Situasi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjamin pemerataan kualitas pendidikan yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

Ketimpangan akses pendidikan di Kerinci menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak dari kalangan berpendapatan rendah menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini berkontribusi pada rendahnya mobilitas sosial dan meningkatkan marginalisasi dalam struktur sosial dan politik (Pertiwi & Hardiyanti, 2022). Keterbatasan akses terhadap pendidikan tidak hanya mengurangi kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan, tetapi juga memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada dalam masyarakat, memperkuat hubungan antara ketidakadilan pendidikan dan ketimpangan ekonomi (Riski & Hajad, 2021). Lingkaran setan ini hanya dapat diputus dengan intervensi yang komprehensif, yang harus mencakup perbaikan sistem pendidikan dan dukungan ekonomi yang berkelanjutan, untuk mengatasi masalah yang bersifat sistemik ini (Herwin et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang lebih luas (Dahlia et al., 2021).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, sangat diperlukan adanya pendekatan kebijakan yang bersifat lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kerinci. Pemerintah harus memberikan prioritas utama pada program-program strategis yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan infrastruktur sekolah yang memadai, serta penyediaan beasiswa dan bantuan finansial yang ditujukan khusus bagi keluarga kurang mampu agar dapat mengurangi beban biaya pendidikan (Azahari, 2020; Alui & Fathurrahman, 2024). Selain itu, peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan harus diperkuat dan diperluas agar suara dan kepentingan kelompok rentan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kurang beruntung, dapat terakomodasi secara adil dan transparan. Di samping itu, perhatian khusus juga harus diberikan terhadap isu ketimpangan gender dalam dunia pendidikan. Hambatan-hambatan budaya dan stereotip sosial yang masih kental di masyarakat sering kali membatasi akses perempuan terhadap pendidikan yang setara dan bermutu, termasuk di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang sensitif terhadap aspek gender, yang tidak hanya mendorong peningkatan akses tetapi juga memberdayakan perempuan agar dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki (Sari, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal, terutama dalam konteks pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah berbagai kajian ilmiah yang membahas ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal, dengan fokus utama pada konteks Kabupaten Kerinci. Data dikumpulkan secara sistematis dengan menelusuri literatur melalui platform Google Scholar dan beberapa basis data ilmiah daring lainnya, menggunakan kata kunci seperti "*ketimpangan pendidikan*", "*akses pendidikan daerah tertinggal*", "*kemiskinan dan pendidikan*", "*Kabupaten Kerinci*", dan "*ekonomi politik pendidikan*". Literatur yang dikumpulkan dibatasi pada periode tahun 2020 hingga 2025 untuk memastikan keterkinian dan relevansi informasi. Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi publikasi ilmiah yang telah melalui proses *peer-review*, artikel jurnal yang membahas topik pendidikan di wilayah tertinggal, serta dokumen kebijakan dan laporan resmi yang relevan, khususnya dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi pemerintah terkait. Sebaliknya, literatur yang bersifat opini, tidak tersedia dalam teks lengkap, atau tidak relevan dengan fokus penelitian dikecualikan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam setiap literatur, melakukan pengkodean terhadap isu-isu yang muncul (seperti faktor ekonomi, politik, dan sosial), serta menyintesis temuan-temuan tersebut untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan terstruktur mengenai ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal. Hasil analisis ini

digunakan untuk menyusun narasi akademik dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dalam upaya mengatasi persoalan pendidikan di Kabupaten Kerinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi politik yang membentuk struktur distribusi sumber daya, terutama dalam sektor pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan alokasi anggaran pendidikan, menjadi determinan utama dalam membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak. Data BPS Kabupaten Kerinci (2023) mencatat bahwa angka kemiskinan di beberapa kecamatan masih tergolong tinggi, di atas rata-rata provinsi Jambi, yang berdampak langsung terhadap partisipasi sekolah, terutama di jenjang menengah dan atas. Dari sisi politik, ketimpangan akses pendidikan di Kerinci juga dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi geografis dan sosial daerah tertinggal.

Literatur seperti Alui & Fathurrahman (2024) dan Sulastri et al. (2024) menyoroti lemahnya perencanaan berbasis data lokal serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pendidikan. Ini mengindikasikan bahwa agenda pendidikan di daerah tertinggal seperti Kerinci kerap tidak selaras dengan kebutuhan komunitas lokal, menciptakan ketidakseimbangan antara ketersediaan layanan pendidikan dan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Selain itu, hasil studi yang dianalisis melalui SLR juga menunjukkan adanya hubungan erat antara ketimpangan pendidikan dengan minimnya intervensi afirmatif dalam kebijakan publik. Misalnya, Pertiwi & Hardiyanti (2022) dan Riski & Hajad (2021) menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga miskin atau komunitas marginal—seperti nelayan dan petani—memiliki hambatan struktural yang kuat dalam mengakses pendidikan, baik karena faktor ekonomi langsung maupun karena kurangnya dukungan institusional. Dalam konteks Kerinci, keterbatasan ini diperparah oleh kondisi geografis berupa wilayah pegunungan dan akses transportasi yang terbatas, yang menurunkan angka partisipasi sekolah, terutama di wilayah perbatasan kecamatan.

Integrasi hasil kajian dengan teori ekonomi politik pendidikan menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci bukan hanya soal kurangnya sumber daya, melainkan merupakan akibat dari relasi kuasa dan ketidakseimbangan distribusi manfaat kebijakan. Ketika elite politik daerah lebih menekankan pembangunan fisik yang bersifat simbolik ketimbang pemerataan kualitas pendidikan, maka kelompok marjinal tetap terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Puspita Sari (2021) yang menegaskan bahwa ketimpangan gender dan ekonomi dalam akses pendidikan dapat menjadi penghambat utama dalam pembangunan manusia.

Pembahasan

Ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Selain terkait dengan ketersediaan fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana pendukung, ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik yang berjalan di daerah tersebut. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, konsentrasi anggaran di pusat kota, serta lemahnya perhatian kebijakan terhadap daerah terpencil semakin memperburuk kondisi akses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berbasis data untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Sejalan dengan hal ini, Putra, Rezeki, Fitrisia, dan Fatimah (2025) mengemukakan pentingnya transformasi ilmu administrasi negara agar dapat merespons dinamika dan kompleksitas kebijakan di era digital, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dinamika ekonomi politik membentuk relasi kekuasaan antara aktor-aktor seperti pemerintah daerah, elite lokal, dan masyarakat, yang pada akhirnya menentukan pola distribusi sumber daya serta arah kebijakan publik yang diterapkan di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka partisipasi sekolah (APS), khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), di Kabupaten Kerinci masih berada di

bawah rata-rata APS provinsi Jambi. Ketimpangan ini paling mencolok terlihat di wilayah perdesaan dan daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau, seperti pegunungan, perbatasan antarkecamatan, dan desa yang belum terhubung dengan infrastruktur transportasi memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya pemerataan dan keadilan akses pendidikan yang memerlukan pendekatan kebijakan lebih inklusif, berbasis data spasial, dan responsif terhadap karakteristik lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Rezeki dan Frinaldi (2024) yang menekankan pentingnya strategi pemerintahan daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan pembangunan berbasis kondisi lokal sebagai upaya memperkuat efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah.

Dalam konteks ekonomi, kemiskinan menjadi faktor utama yang secara signifikan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal seperti Kabupaten Kerinci. Kemiskinan memengaruhi kemampuan keluarga dalam menyediakan kebutuhan dasar pendidikan, mulai dari biaya seragam, alat tulis, transportasi, hingga kesempatan belajar yang layak. Berbagai kajian yang dianalisis dalam penelitian ini, antara lain Azahari (2020), Riski & Hajad (2021), serta Pertiwi & Hardiyanti (2022), secara konsisten menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, dan papan dibandingkan dengan investasi jangka panjang dalam pendidikan anak-anak mereka. Ketika tekanan ekonomi mendesak, pendidikan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sekunder, bukan kebutuhan primer. Akibatnya, angka kelanjutan sekolah di kalangan keluarga miskin cenderung rendah, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan atas. Di Kabupaten Kerinci, anak-anak dari keluarga dengan latar belakang sebagai nelayan, petani kecil, atau buruh harian sering kali harus terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi rumah tangga. Mereka membantu orang tua bekerja di ladang, kebun, atau pasar, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi terbatas. Situasi ini memperkuat lingkaran ketimpangan sosial dan pendidikan yang terus berlangsung dari generasi ke generasi, dan sangat sulit diputus tanpa adanya intervensi kebijakan yang holistik, afirmatif, serta dukungan ekonomi yang terstruktur bagi keluarga kurang mampu.

Dari sudut pandang politik, ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran pendidikan yang belum merata dan belum optimal dalam menjangkau daerah-daerah tertinggal yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan ekstra dari pemerintah. Alokasi dana yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah-daerah terpencil sering kali terserap oleh belanja rutin atau dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih strategis secara politis. Beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh Khairunnisa et al. (2021), mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan belum sepenuhnya diarahkan secara efektif ke wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi, terutama daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan secara sosial ekonomi tergolong lemah. Ketidakeimbangan dalam perencanaan dan implementasi anggaran ini mengakibatkan sejumlah sekolah di daerah tertinggal di Kerinci mengalami kekurangan fasilitas, minimnya tenaga pengajar berkualitas, serta terbatasnya akses terhadap teknologi dan sumber belajar. Selain itu, temuan dari Fatah et al. (2021) turut memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia secara nasional cenderung stagnan, terutama di wilayah-wilayah marginal dan terpencil yang belum tersentuh program afirmatif yang efektif. Hal ini terjadi karena lemahnya implementasi kebijakan pendidikan yang tidak berbasis pada data lokal yang akurat dan kontekstual, sehingga berbagai program pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah sering kali tidak tepat sasaran, tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat, dan cenderung bersifat seremonial semata. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan struktural yang makin melebar dalam hal akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Kerinci, serta menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih berbasis bukti dan berorientasi pada keadilan spasial dan sosial.

Literatur lain seperti Alui & Fathurrahman (2024) dan Ulfa (2023) menegaskan bahwa reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan disesuaikan dengan konteks lokal sangatlah penting, khususnya bagi daerah perbatasan dan wilayah terpencil yang memiliki tantangan unik. Dalam konteks Kabupaten Kerinci, masalah distribusi tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan masih jauh dari merata, sehingga menimbulkan beban yang cukup berat bagi para siswa yang

tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kecamatan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti kondisi jalan yang buruk serta minimnya akses terhadap transportasi umum menjadi kendala nyata yang sering kali terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Faktor-faktor ini secara keseluruhan menghambat upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kerinci, sehingga memerlukan perhatian dan solusi yang lebih serius dan terintegrasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, teori ketimpangan akses pendidikan mengasumsikan bahwa distribusi kekuasaan politik memainkan peranan penting dalam menentukan siapa saja yang menjadi prioritas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang seharusnya bersifat universal dan inklusif sering kali terhambat oleh praktik-praktik politik yang eksklusif dan tidak merata, di mana kebijakan publik lebih mencerminkan kepentingan kelompok elit dibandingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilihat dari temuan Puspita Sari (2021) dan Muhammad (2023) yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh elite lokal dalam penyusunan anggaran dan program-program pendidikan seringkali tidak didasarkan pada kajian kebutuhan yang objektif dari masyarakat akar rumput. Sebaliknya, alokasi dan prioritas anggaran pendidikan cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral, seperti kepentingan mempertahankan basis dukungan politik menjelang pemilihan umum, atau bahkan sekadar pencitraan simbolik tanpa keberlanjutan. Kondisi seperti ini turut menyebabkan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelajar dan masyarakat di Kabupaten Kerinci, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menunjang kualitas pendidikan di era transformasi digital saat ini.

Ketimpangan tersebut memperlebar kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, seperti akses terhadap internet, perangkat digital, dan konten pembelajaran daring yang seharusnya dapat menjangkau siswa di daerah terpencil. Fenomena ini juga telah dikaji secara mendalam oleh Irnawati et al. (2022) dan Herwin et al. (2023), yang menyoroti bahwa keterbatasan akses dan penggunaan media pembelajaran digital bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan hasil dari ketimpangan struktural dan politik yang tidak berpihak pada kelompok rentan dan wilayah marginal. Selaras dengan hal tersebut, Frinaldi, Afdalisma, Rezeki, dan Saputra (2024) dalam studi mereka mengenai transformasi digital administrasi pemerintahan menegaskan bahwa meskipun digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tantangan serius terkait ketimpangan akses dan kapasitas teknologi masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan digital di Indonesia. Maka dari itu, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis keadilan sosial dalam formulasi kebijakan pendidikan.

Ketimpangan akses pendidikan juga memiliki dimensi spasial yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Rizal dan Syaibana (2022) dalam kajiannya yang memetakan distribusi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) negeri di Kabupaten Banyuwangi. Kajian tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang cukup jelas antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran atau terpencil dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan menengah. Temuan ini menjadi sangat relevan apabila diterapkan dalam konteks Kabupaten Kerinci, yang juga menghadapi tantangan geografis serupa, seperti wilayah pegunungan yang curam, jaringan transportasi yang belum memadai, serta penyebaran penduduk yang cenderung tersebar secara tidak merata di berbagai nagari dan kecamatan. Kondisi geografis ini memperburuk kesenjangan akses pendidikan karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh dan tidak adanya sarana transportasi yang layak, terutama bagi siswa di daerah perdesaan. Tantangan tersebut membuat banyak anak usia sekolah kesulitan menjangkau satuan pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah. Dalam situasi ini, pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dan data spasial menjadi sangat krusial. Teknologi ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih akurat dan berkeadilan, karena memungkinkan identifikasi titik-titik kekurangan fasilitas secara objektif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi penyediaan dan distribusi sekolah secara lebih tepat sasaran, sehingga disparitas spasial dalam layanan pendidikan dapat

diminimalkan dan akses yang setara bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dapat diwujudkan secara bertahap.

Literatur dari Sulastri et al. (2024), Dahlia et al. (2021), dan Ratodi et al. (2021) juga memberikan wawasan penting mengenai peran aspek kelembagaan dalam ketimpangan akses pendidikan. Mereka menyoroti bahwa faktor-faktor seperti kepemilikan hak akses terhadap sumber belajar, ketersediaan media pembelajaran baik secara daring maupun luring, serta kebijakan terkait lisensi terbuka, memiliki pengaruh signifikan dalam memperlebar jurang pembelajaran di daerah tertinggal. Ketidakmerataan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya pendidikan tersebut memperparah kesenjangan belajar, sehingga siswa di wilayah kurang berkembang menjadi lebih sulit untuk mengakses materi pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi dan politik, dinamika kelembagaan juga menjadi elemen krusial yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah-daerah seperti Kabupaten Kerinci.

Dari sisi literasi dan kualitas hidup, Dharana et al. (2024) menekankan bahwa literasi merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia yang setara dan berkelanjutan. Tingkat literasi dasar yang rendah secara langsung berpengaruh terhadap melemahnya partisipasi pendidikan, karena individu yang kurang literat cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami materi pembelajaran. Selain itu, studi mengenai pelatihan guru yang dilakukan oleh Dahlia et al. (2021) menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik, terutama di masa pascapandemi Covid-19. Peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran daring maupun hybrid menjadi sangat krusial agar proses belajar mengajar dapat terus berlangsung secara efektif, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Pendekatan pembelajaran yang adaptif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Kerinci.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci merupakan hasil interaksi antara struktur ekonomi-politik, kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif. Pendekatan ekonomi politik memungkinkan kita memahami bahwa kebijakan pendidikan tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan aktor-aktor dominan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada prinsip keadilan distributif, perencanaan berbasis data lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta investasi infrastruktur dan SDM pendidikan yang berkeadilan. Upaya ini penting untuk menjamin bahwa seluruh anak-anak di Kabupaten Kerinci, tanpa kecuali, dapat menikmati hak dasar atas pendidikan yang setara dan berkualitas.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Kerinci merupakan akibat dari kombinasi faktor ekonomi politik, termasuk kemiskinan, minimnya alokasi anggaran pendidikan, serta kurangnya infrastruktur dan pemerataan kebijakan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa struktur ekonomi dan dinamika politik lokal sangat menentukan distribusi layanan pendidikan. Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan lembaga legislatif daerah untuk memperkuat intervensi kebijakan berbasis data, meningkatkan anggaran pendidikan di wilayah terpencil, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta guna memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alui, F., & Fathurrahman, R. (2024). Ragam Inisiatif Reformasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Refleksi dari Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3), 557–563. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.2013>
- Azahari, R. (2020). Pengaruh Kemiskinan Dan Pendidikan Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 56–63. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.14>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Kerinci dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Kerinci. <https://kerincikab.bps.go.id>
- Dahlia, S., NH, T., & Adiputra, A. (2021). Peningkatan kapasitas guru geografi memanfaatkan media pembelajaran online dan offline di masa covid 19. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4527>
- Dara Haura Dharana, Rezqita Asharizah Arbani, & Ichsan Fauzi Rachman. (2024). Membangun Kualitas Hidup Melalui Literasi (Analisis Kasus Masyarakat Sunda). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (JKMI)*, 1(3), 79–86. <https://doi.org/10.62017/jkmi.v1i3.1257>
- Fatah, A., Suhaili, M., & Farida, I. (2021). Analisis indikator pendidikan: partisipasi pendidikan di indonesia periode 1994-2018. *Jurnal Kependidikan Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 555. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3516>
- Frinaldi, A., Afdalisma, A., Rezeki, A. P. T., & Saputra, B. (2024, November). Digital Transformation of Government Administration: Analysis of Efficiency, Transparency, and Challenges in Indonesia. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 82-101).
- Herwin, H., Nurung, A., & Kosman, R. (2023). Pendampingan dan edukasi pada keluarga dengan anak stunting tentang pembuatan suplemen daun kelor melalui studi antropometri. *Media Karya Kesehatan*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/mkk.v6i1.38264>
- Irnawati, I., Arsana, I., Zaman, A., Anugraheni, M., & Salma, J. (2022). Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi quizizz sebagai media pembelajaran. *Kanigara*, 2(2), 404-411. <https://doi.org/10.36456/kanigara.v2i2.5990>
- Khairunnisa, R., Imansyah, M. H., & Rahayu, D. (2021). Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur. *Syntax Idea*, 3(12), 2748. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.1678>
- Muhammad, A. (2023). Analisis Swot Transformasi Digital Pada Lansia Dalam Penggunaan Jasa Perbankan Di Indonesia Era Society 5.0. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 79. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17303>
- Pertiwi, D. and Hardiyanti, W. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di pulau jawa. *Equilibrium Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 103-112. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4448>
- Puspita Sari, C. (2021). Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 47–52. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>
- Putra, A., Rezeki, T., Fitriasia, A., & Fatimah, S. (2025). *Transformasi Taksonomi Ilmu Administrasi Negara dalam Merespons Environmental Informatics di Era Digital*. 9, 13993–14000.
- Ratodi, M., Ramadhan, H. W., Abraham, J., Aribowo, E. K., Kesmawan, A. P., & Kiramang, K. (2021). Potret kepemilikan hak cipta dan penggunaan lisensi terbuka pada penerbitan ilmiah di Indonesia. *Publishing Letters*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.48078/publetters.v1i1.1>
- Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2024). Strategi Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dalam Menjaga Keberlanjutan Lahan dan Pangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(2), 204-214.
- Riski, W. and Hajad, V. (2021). Pengaruh kemiskinan terhadap akses pendidikan bagi anak nelayan di aceh selatan. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3256>
- Rizal, S. and Syaibana, P. (2022). Analisis keterjangkauan dan pola persebaran sma/ma negeri di kabupaten banyuwangi menggunakan analisis buffering dan nearest neighbor pada aplikasi q-gis. *Techno Com*, 21(2), 355-363. <https://doi.org/10.33633/tc.v21i2.5996>
- Sulastri, F., Dewi, R., & Bahrudin, F. (2024). Untitled. *Jurnal Pendidikan Riset Dan Konseptual*, 8(3), 489. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i3.1021
- Ulfa, M. (2023). Potret kondisi sekolah daerah terpencil di dusun bandealit desa andongrejo kecamatan tempurejo kabupaten jember. *JUPE2*, 1(1), 11-26. <https://doi.org/10.54832/jupe2.v1i1.90>